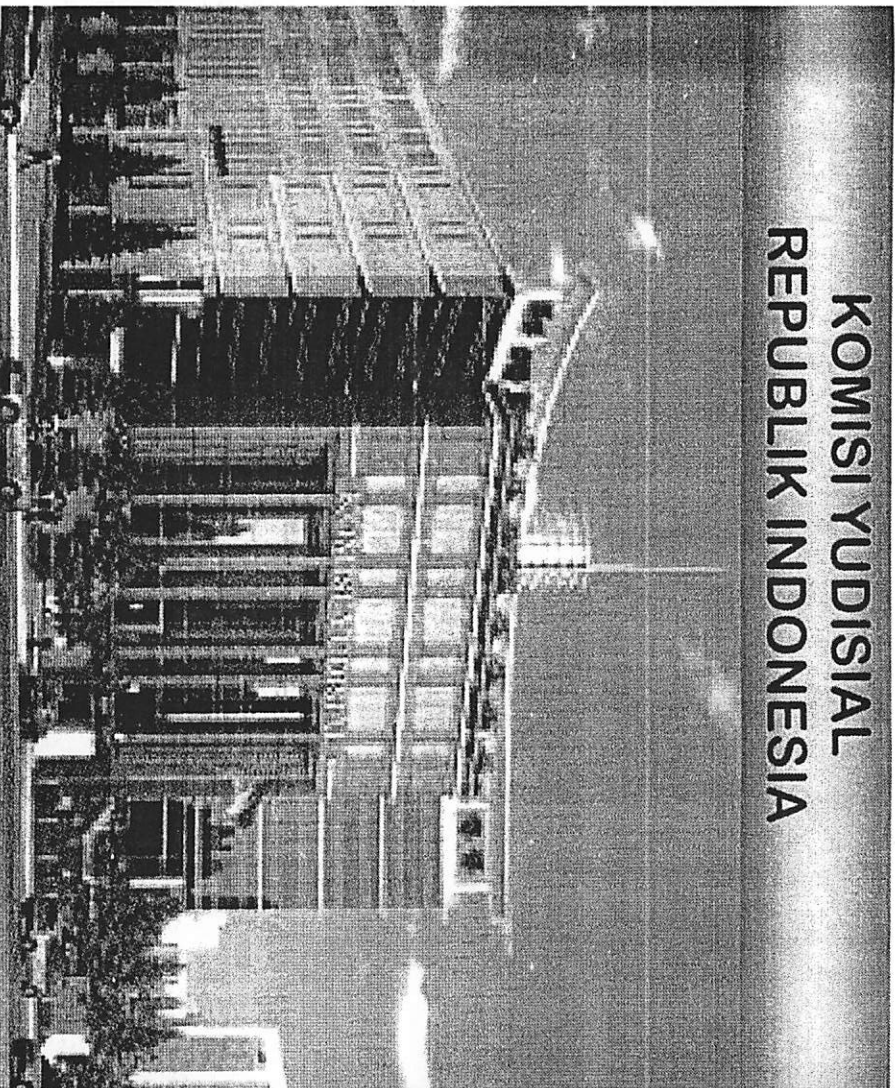


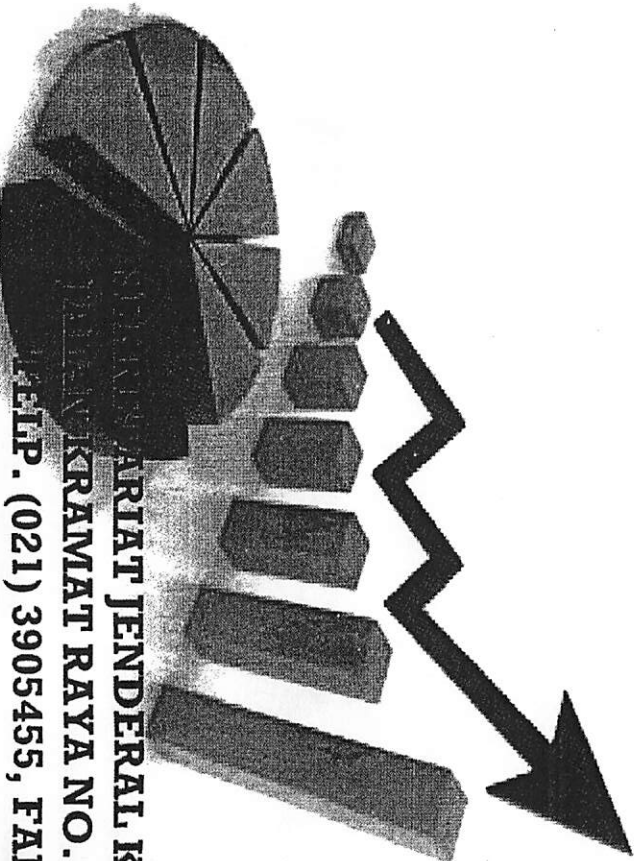


**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2011
(AUDITED)**

**STAFINIA ARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 3905455, FAKS. (021) 3905455**



**BAGIAN ANGGARAN 100
KOMISI YUDISIAL RI**



**LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
TAHUN ANGGARAN 2011**

(Audited)

**Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp. (021) - 31903644**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Yudisial RI adalah salah satu Lembaga Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-51/PB/2008, sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan laporan Keuangan Tahun 2011 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp343.537.136,00. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp68.611.548.245,00 atau 86,07% dari yang dianggarkan dalam DIPA Rp79.719.292.000,00.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2011. Dari neraca tersebut, diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp153.265.262.354,00 dan Kewajiban sebesar Rp29.704.155,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp153.235.558.199,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
4. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 ini berstatus sebagai Laporan keuangan yang sudah diperiksa (*Audited*) oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik, yang membangun dari para pengguna laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta,

2012

Sekretaris Jenderal



Muzayyin Mahbub
NIP 19530605 198003 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
Daftar Singkatan	vii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Pernyataan Telah Direviu	xi
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT Perbandingan 2011 dan 2010)	
III. Neraca (NSAIKLT Perbandingan 2011 dan 2010)	
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	4
A. Penjelasan Umum	4
A.1. Dasar Hukum	4
A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga	4
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.4. Kebijakan Akuntansi	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	13
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	13
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
B.3. Catatan Penting Lainnya	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
C.1. Penjelasan Umum Neraca	23
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	24
C.3. Catatan Penting Lainnya	38
D. Pengungkapan Penting Lainnya	39
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	39
D.2. Rekening Pemerintah	40
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	40
D.4. Pengungkapan Lain-Lain	41

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 dan 2010	1
2. Tabel Perbandingan Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010	2
3. Tabel Realisasi Pendapatan Tahun 2011 dan 2010	6
4. Tabel Rincian Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2011 dan 2010	7
5. Tabel Rincian Realisasi Per Program Tahun 2011 dan 2010	7
6. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2011	13
7. Tabel Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2011 dan 2010	15
8. Tabel Realisasi Belanja Negara Tahun 2011 dan 2010	15
9. Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2011 dan 2010	16
10. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2011 dan 2010	17
11. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2011 dan 2010	18
12. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional Tahun 2011 dan 2010	18
13. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun 2011 dan 2010	19
14. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2011 dan 2010	19
15. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2011 dan 2010	20
16. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Tahun 2011 dan 2010	20
17. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri Tahun 2011 dan 2010	21
18. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2011 dan 2010	21
19. Tabel Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2011 dan 2010	23
20. Tabel Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2011 dan 2010	24
21. Tabel Realisasi/Penggantian Dana Uang Persediaan	24
22. Tabel Kelebihan Sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP)	24
23. Tabel Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2011 dan 2010	25
24. Tabel Sisa Dana Operasional Pimpinan (DOP)	26
25. Tabel Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2011 dan 2010	26
26. Tabel Daftar Persediaan Per 31 Desember 2011 dan 2010	26
27. Tabel Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember 2011 dan 2010	27
28. Tabel Rekapitulasi Kapitalisasi Aset Tetap Per 31 Desember 2011	28
29. Tabel Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN Tahun 2011	28
30. Tabel Perbandingan Tanah Per 31 Desember 2011 dan 2010	29
31. Tabel Perbandingan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2011 dan 2010	29
32. Tabel Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2011	30
33. Tabel Perbandingan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2011 dan 2010	31
34. Tabel Pengembangan Bangunan Gedung Kantor Permanen Tahun Anggaran 2011	31
35. Tabel Perbandingan Jaringan Per 31 Desember 2011 dan 2010	32

36. Tabel Perbandingan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2011 dan 2010	32
37. Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2011	32
38. Tabel Perbandingan Aset Lainnya Per 31 Desember 2011 dan 2010	33
39. Tabel Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2011 dan 2010	33
40. Tabel Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Per 31 Desember 2011	33
41. Tabel Perbandingan Hutang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2011 dan 2010	34
42. Tabel Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2011 dan 2010	34
43. Tabel Perbandingan Uang Muka Dari KPPN Per 31 Desember 2011 dan 2010	35
44. Tabel Perbandingan Pendapatan yang Ditangguhkan Per 31 Desember 2011 dan 2010	35
45. Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2011 dan 2010	35
46. Tabel Perbandingan Cadangan Persediaan Per 31 Desember 2011 dan 2010	36
47. Tabel Perbandingan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2011 dan 2010	36
48. Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Investasi Per 31 Desember 2011 dan 2010	37
49. Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Per 31 Desember 2011 dan 2010	37
50. Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Per 30 Juni 2011 dan 2010	38
51. Tabel Pengadaan Sistem Aplikasi Pada Tahun 2011	38

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik Komposisi Realisasi PNPB	14
2. Grafik Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2011	16
3. Grafik Komposisi Neraca Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	23
4. Grafik Komposisi Aset Tetap Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	27

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Perbandingan Tahun 2011 dan 2010
2. Neraca Perbandingan Per 31 Desember 2011 dan 2010
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
6. Neraca Percobaan Per 31 Desember 2011
7. Laporan SABMN
8. Laporan Kondisi Barang
9. Laporan Barang Persediaan
10. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca
11. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2011
12. Monitoring Penutupan Rekening Komisi Yudisial RI
13. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2010 sampai dengan 31 Oktober 2011
14. Koreksi Atas Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Pada Laporan Pengguna Barang Per 30 Juni 2011
15. Daftar Rekening Komisi Yudisial RI tahun 2011
16. Berita Acara Pemeriksaan Kas selama Tahun 2011
17. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial RI Per 31 Desember 2011
18. BA Rekonsiliasi dengan DIT. APK Dirjen Perbendaharaan
19. BA Rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta IV
20. BA Rekonsiliasi Data Hibah dengan DIT. EAS - DJPU
21. Rekapitulasi Setoran SSBP selama Tahun 2011
22. Rekapitulasi Setoran SSPB selama Tahun 2011

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN – P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Lapoan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan/Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK – BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Halaman

LAPORAN REALISASI APBN

Penjelasan Umum

Catatan	A.1	Dasar Hukum	4
Catatan	A.2	Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI	4
Catatan	A.3	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
Catatan	A.4	Kebijakan Akuntansi	8

Penjelasan Atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Catatan	B.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	13
Catatan	B.2	Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	14
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	14

Belanja Negara

Catatan	B.2.2	Belanja Negara	15
Catatan	B.2.2.1	Belanja	16
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	17
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	18
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	21

Catatan Penting Lainnya

Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	22
---------	-----	-------------------------	----

NERACA

ASET

Aset Lancar

Catatan	C.1	Penjelasan Umum Neraca	23
Catatan	C.2	Penjelasan per Pos Neraca	24
Catatan	C.2.1	Aset Lancar	24
Catatan	C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	24
Catatan	C.2.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	25
Catatan	C.2.1.3	Persediaan	26

Aset Tetap

Catatan	C.2.2	Aset Tetap	27
Catatan	C.2.2.1	Tanah	29
Catatan	C.2.2.2	Peralatan dan Mesin	29

Catatan	C.2.2.3	Gedung dan Bangunan	30
Catatan	C.2.2.4	Jaringan	32
Catatan	C.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	32
Aset Lainnya			
Catatan	C.2.3	Aset Lainnya	32
Catatan	C.2.3.1	Aset Tak Berwujud	33
Catatan	C.2.3.2	Aset Lain-Lain	33
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Catatan	C.2.4	Kewajiban Jangka Pendek	34
Catatan	C.2.4.1	Utang kepada Pihak Ketiga	34
Catatan	C.2.4.2	Pendapatan Diterima Dimuka	34
Catatan	C.2.4.3	Uang Muka Dari KPPN	34
Catatan	C.2.4.4	Pendapatan Ditangguhkan	35
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar			
Catatan	C.2.5	Ekuitas Dana Lancar	35
Catatan	C.2.5.1	Cadangan Persediaan	36
Catatan	C.2.5.2	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	36
Catatan	C.2.5.3	Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan	37
Ekuitas Dana Investasi			
Catatan	C.2.6	Ekuitas Dana Investasi	37
Catatan	C.2.6.1	Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	37
Catatan	C.2.6.2	Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	38
Catatan Penting Lainnya			
Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	38
Pengungkapan Penting Lainnya			
Catatan	D.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI	39
Catatan	D.1.1	Atas Sistem Pengendalian Intern Komisi Yudisial RI	39
Catatan	D.1.2	Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	39
Catatan	D.2	Rekening Pemerintah	40
Catatan	D.3	Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	40
Catatan	D.4	Pengungkapan Lain-lain	40
Catatan	D.4.1	Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Komisi Yudisial	40
Catatan	D.4.2	Ketentuan Perundang-Undangan	41
Catatan	D.4.3	Domisili	41

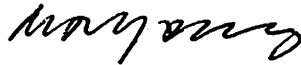
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2012

Sekretaris Jenderal,



Muzayyin Mahbub
NIP 19530605 198003 1 001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI YUDISIAL RI TAHUN ANGGARAN 2011

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2011 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

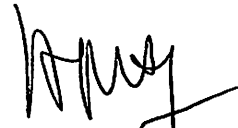
Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta,

2012

Penanggung Jawab



Danang Wijayanto
NIP.19620402 198203 1 001

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tanggal 31 Desember 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2011 *audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tanggal 31 Desember 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp343.537.136,00 walaupun dalam Tahun Anggaran 2011 pendapatan tidak dianggarkan dalam DIPA.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp68.611.548.245,00 atau mencapai 86,07% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja tersebut seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran
Tahun 2011 dan 2010**

dalam rupiah

Uraian	Tahun 2011		Tahun 2010	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	343,537,136,00	0	211.131.399,00
Belanja Rupiah Murni	79.719.292.000,00	68,611,548,245,00	58.473.572.000,00	54.173.126.242,00
Belanja Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0
Belanja Hibah	0	0	0	0

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp153.265.262.354,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp946.285.216,00, Aset Tetap sebesar Rp151.012.775.538,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.306.201.600,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp29.704.155,00. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp153.234.367.080,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp915.389.942,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp152.318.977.138,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

Uraian	Tanggal Neraca		Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
	31-12- 2011	31-12- 2010	
Aset	153,265,262,354	148,594,978,005	4,670,284,349
Aset Lancar	√ 946,285,216	1,089,524,519	(143,239,303)
Aset Tetap	× 151,012,775,538	146,205,251,886	4,807,523,652
Aset Lainnya	× 1,306,201,600	1,300,201,600	6,000,000
Kewajiban	√ 29,704,155	73,787,464	(44,083,309)
Kewajiban Jangka Pendek	√ 29,704,155	73,787,464	(44,083,309)
Ekuitas Dana	× 153,234,367,080	148,521,190,541	4,713,176,539
Ekuitas Dana Lancar	× 915,389,942	1,015,737,055	(100,347,113)
Ekuitas Dana Investasi	√ 152,318,977,138	147,505,453,486	4,813,523,652
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	153,264,071,235	148,594,978,005	4,669,093,230

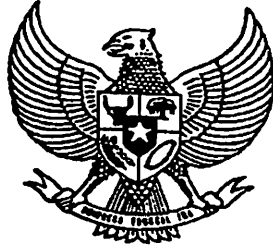
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas asset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

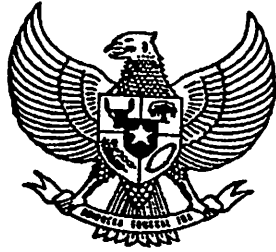
KOMISI YUDISIAL RI



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*FACE REPORT*)
PERBANDINGAN TAHUN 2011 DAN 2010

KOMISI YUDISIAL RI



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 *(Audited)*

**NERACA (FACE REPORT)
PERBANDINGAN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

Kode Lap : LRÄKT
Tanggal : Thursday, 12 April
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pauait

No	URAIAN	2011				2010			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	0	343,537,136	343,537,136	0.00	0	211,131,399	211,131,399	0.00
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	0	343,537,136	343,537,136	0.00	0	211,131,399	211,131,399	0.00
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	343,537,136	343,537,136	0.00	0	211,131,399	211,131,399	0.00
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A.II)	0	343,537,136	343,537,136	0.00	0	211,131,399	211,131,399	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	79,719,292,000	68,611,548,245	(11,107,743,755)	86.07	58,473,572,000	54,173,126,242	(4,300,445,758)	92.65
B.I.1	Rupiah Murni	79,719,292,000	68,611,548,245	(11,107,743,755)	86.07	58,473,572,000	54,173,126,242	(4,300,445,758)	92.65
B.I.1.a	Belanja Pegawai	8,254,620,000	7,520,168,706	(734,451,294)	91.10	6,283,934,000	6,202,123,278	(81,810,722)	98.70
B.I.1.b	Belanja Barang	66,641,256,000	56,268,448,617	(10,372,807,383)	84.43	50,614,888,000	46,448,992,726	(4,165,895,274)	91.77
B.I.1.c	Belanja Modal	4,823,416,000	4,822,930,922	(485,078)	99.99	1,574,750,000	1,522,010,238	(52,739,762)	96.65
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : Thursday, 12 April
Halaman : 2
Prog.Id : lu_pauait

No	URAIAN	2011				2010			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B.I + B.II)	79.719.292.000	68.611.548.245	(11.107.743.755)	86.07	58.473.572.000	54.173.126.242	(4.300.445.758)	92.65
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 + C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Jakarta, 31 Desember 2011

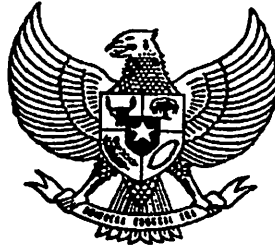
Sekretaris Jenderal KYRI



Muzayyin Mahbub

NIP 19530605 198003 1 001

KOMISI YUDISIAL RI



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 *(Audited)*

**NERACA (FACE REPORT)
PERBANDINGAN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

**SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
NERACA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN PER 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	40,747	-	40,747	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	365,408	558,839	193,431	34.61
Persediaan	945,879,061	1,088,965,680	143,086,619	13.14
JUMLAH ASET LANCAR	946,285,216	1,089,524,519	143,239,303	13.15
ASET TETAP				
Tanah	47,188,389,400	47,188,389,400	-	-
Peralatan dan Mesin	29,796,908,077	26,363,320,178	3,433,587,899	13.02
Gedung dan Bangunan	69,839,350,735	68,674,690,857	1,164,659,878	1.70
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,421,134,028	3,421,134,028	-	-
Aset Tetap Lainnya	557,717,423	557,717,423	-	-
JUMLAH ASET TETAP	150,803,499,663	146,205,251,886	4,807,523,652	3.29
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,306,201,600	1,300,201,600	6,000,000	-
Aset Lain-Lain	209,275,875	-	209,275,875	-
JUMLAH ASET LAINNYA	1,515,477,475	1,300,201,600	215,275,875	16.56
JUMLAH ASET	153,265,262,354	148,594,978,005	4,670,284,349	3.14
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	19,500,000	63,430,625	43,930,625	69.26
Uang Muka dari KPPN	40,747	-	40,747	-
Pendapatan di terima di muka	9,798,000	9,798,000	-	-
Pendapatan yang ditangguhkan	365,408	558,839	193,431	34.61
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	29,704,155	73,787,464	44,083,309	59.74
JUMLAH KEWAJIBAN	29,704,155	73,787,464	44,083,309	59.74
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Persediaan	945,879,061	1,088,965,680	143,086,619	13.14
Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	-	63,430,625	43,930,625	69.26
Barang/Jasa yang harus diserahkan	-	9,798,000	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	916,581,061	1,015,737,055	99,155,994	9.76
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	150,803,499,663	146,205,251,886	4,807,523,652	3.29
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1,515,477,475	1,300,201,600	215,275,875	16.56
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	152,318,977,138	147,505,453,486	4,813,523,652	3.26
JUMLAH EKUITAS DANA	153,235,558,199	148,521,190,541	4,714,367,658	3.17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	153,265,262,354	148,594,978,005	4,670,284,349	3.14

Jakarta,
Sekretaris Jenderal

Muzayyin Mahbub

Muzayyin Mahbub
NIP 19530605198003 1 001

**SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
NERACA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN PER 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 100 KOMISI YUDISIAL RI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	40,747
Kas Lainnya dan Setara Kas	365,408
Persediaan	945,879,061
JUMLAH ASET LANCAR	946,285,216
ASET TETAP	
Tanah	47,188,389,400
Peralatan dan Mesin	29,796,908,077
Gedung dan Bangunan	69,839,350,735
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,421,134,028
Aset Tetap Lainnya	557,717,423
JUMLAH ASET TETAP	150,803,499,663
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	1,306,201,600
Aset Lain-Lain	209,275,875
JUMLAH ASET LAINNYA	1,515,477,475
JUMLAH ASET	153,265,262,354
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	19,500,000
Uang Muka dari KPPN	40,747
Pendapatan di terima di muka	9,798,000
Pendapatan yang ditangguhkan	365,408
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	29,704,155
JUMLAH KEWAJIBAN	29,704,155
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Persediaan	945,879,061
Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	-
Barang/Jasa yang harus diserahkan	19,500,000
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	9,798,000
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	150,803,499,663
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1,515,477,475
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	152,318,977,138
JUMLAH EKUITAS DANA	153,235,558,199
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	153,265,262,354

Jakarta,
Sekretaris Jenderal



Muzayyin Mahbub
NIP 19530605198003 1 001



NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
 Tanggal : 12/04/12
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2011	2010	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	152,318,977,138	147,505,453,486	4,813,523,652	3.26
JUMLAH EKUITAS DANA	153,235,558,199	148,521,190,541	4,714,367,658	3.26
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	153,265,262,354	148,594,978,005	4,670,284,349	3.14

Jakarta, 31 Desember 2011
 Sekretaris Jenderal KYRI



Muzayyin Mahbub
 NIP 19530605 198003 1 001

KOMISI YUDISIAL RI



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 *(Audited)*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Edisi cetak 2011).

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI YUDISIAL RI

*Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL RI

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU No. 18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "*checks and balances*" untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah Terwujudnya Fungsi dan Kewenangan Badan Kekuasaan Kehakiman yang Bersih, Merdeka dan Bertanggungjawab untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Calon Hakim Agung yang berintegritas, kompeten dan berani.

- b. Melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial serta mendorong partisipasi publik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Rencana aktivitas Komisi Yudisial RI berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai kewenangan dan tugas yang diembannya, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

- a. *Aktivitas pengusulan Calon Hakim Agung*; demi terwujudnya lembaga peradilan yang berkarakter dan berkompetensi melalui pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan penetapan Calon Hakim Agung yang memenuhi kriteria karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan amanah penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.
- b. *Aktivitas pengelolaan*; mengupayakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai instrument peradilan, baik untuk maksud pengembangan *reward system* maupun untuk pengembangan *checks and balances* demi penegakkan kehormatan dan keluhuran lembaga peradilan.
- c. *Aktivitas pengawasan*; mengupayakan terselenggaranya pola pengawasan perilaku hakim oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang cepat dan akurat, dalam upaya penegakan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan dan meningkatkan sikap kewaspadaan serta kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara.
- d. *Aktivitas pengendalian*; mengupayakan tindakan cepat dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap perilaku para hakim yang terbukti melanggar azas kepastian dan keadilan hokum agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan yang berakibat menurunnya kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.

Pendapatan

PENDAPATAN KOMISI YUDISIAL RI

Realisasi pendapatan pada tahun 2011 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan nilai sebesar Rp343.537.136,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp132.405.737,00 sebagaimana terlihat pada daftar berikut:

**TABEL REALISASI PENDAPATAN
TAHUN 2011 DAN 2010**

dalam rupiah

No.	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI PNPB		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2011	2010	
1	Jasa Giro	0	0	0
2	Denda	14.559.858	3.785.507	10.774.351
3	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	270.189.278	147.157.892	123.031.386
4	Pendapatan Sewa/Kantor oleh BRI	58.788.000	58.788.000	0
5	Pendapatan lain-lain	0	1.000.000	(1.000.000)
6	Pendapatan Penghapusan	0	400.000	(400.000)
	JUMLAH	343.537.136	211.131.399	132.405.737

Kenaikan tersebut terutama diakibatkan dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang sangat besar, juga pendapatan sewa ruangan untuk kantor cabang pembantu Bank BRI serta pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Belanja

BELANJA KOMISI YUDISIAL RI

Realisasi belanja pada 2011 adalah sebesar Rp68.962.247.320,00 sedangkan pengembalian belanja sebesar Rp350.699.075,00 sehingga realisasi belanja bersih sebesar Rp 68.611.548.245,00 atau mencapai 86.07% dari pagu anggarannya sebesar Rp79.719.292.000,00. Dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2010 sebesar Rp54.173.126.242,00 secara keseluruhan terjadi kenaikan sebesar Rp14.438.422.003,00. Kenaikan terbesar terdapat pada Belanja Barang dengan realisasi anggaran sebesar Rp56.268.488.617.

Rincian lebih lanjut realisasi belanja per jenis belanja dan program dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL RINCIAN REALISASI PER JENIS BELANJA TAHUN 2011 DAN 2010

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2011	2010	
51	Belanja Pegawai	7.520.168.706	6.202.123.278	1.318.045.428
52	Belanja Barang	56.268.448.617	46.448.992.726	9.819.455.891
53	Belanja Modal	4.822.930.922	1.522.010.238	3.300.920.684
	JUMLAH	68.611.548.245	54.173.126.242	14.438.422.003

Realisasi belanja sebesar Rp68.611.548.245,00 tersebut digunakan untuk membiayai tiga program sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Yudisial RI tahun 2011. Program Kerja tahun 2011 berbeda dari tahun sebelumnya sehubungan dengan mulai diterapkannya Program dan Kegiatan hasil Restrukturisasi pada Kementerian dan Lembaga mulai tahun 2011. Adapun rincian realisasi belanja berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL RINCIAN REALISASI PER PROGRAM TAHUN 2011 DAN 2010

dalam rupiah

NAMA PROGRAM	REALISASI BELANJA		KENAIKAN/ PENURUNAN
	2011	2010	
Penerapan Pemerintahan yang Baik	0	42.764.769.240	(42.764.769.240)
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Ham	0	2.791.480.344	(2.791.480.344)
Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	0	8.616.876.658	(8.616.876.658)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	51.382.107.500	0	51.382.107.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	3.151.895.509	0	3.151.895.509

Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	14.077.545.236	0	14.077.545.236
JUMLAH	68.611.548.245	54.173.126.242	14.438.422.003

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.

Untuk tahun 2011, transaksi keuangan dari APBN yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI sebesar Rp79.719.292.000,00.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Komisi Yudisial RI adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Komisi Yudisial RI mengakui pendapatan pada saat kas diterima oleh Kas Umum Negara. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak

kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2011 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Disamping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2011 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Dalam tahun anggaran 2011, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI tidak menganggarkan pendapatan. Namun demikian, hingga 31 Desember 2011 realisasi pendapatan mencapai sebesar Rp343.537.136,00.

Selama Tahun Anggaran 2011 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI menerima anggaran belanja sebesar Rp79.719.292.000,00 untuk membiayai kegiatan Komisi Yudisial RI. Realisasi belanja bruto pada tahun 2011 adalah sebesar Rp68.962.247.320,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp350.699.075,00 sehingga realisasi belanja bersih sebesar Rp68.611.548.245,00 atau mencapai 86,07% dari total anggaran sebesar Rp79.719.292.000,00.

TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011

dalam rupiah

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
A	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	0	343.537.136	0
A.1	Penerimaan Pajak	0	0	0
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	343.537.136	0
A.3	Penerimaan Hibah	0	0	0
B	Realisasi Belanja Negara	79.719.292.000	68.611.548.245	86.07
B.1	Belanja Rupiah Murni	79.719.292.000	68.611.548.245	86.07
B.1.1	Belanja Pegawai	8.254.620.000	7.520.168.706	91.10
B.1.2	Belanja Barang	66.641.256.000	56.268.448.617	84.43
B.1.3	Belanja Modal	4.823.416.000	4.822.930.922	99.99
B.2	Belanja Pinjaman Luar Negeri	0	0	0
B.3	Belanja Rupiah Pendamping	0	0	0
B.4	Belanja Hibah	0	0	0

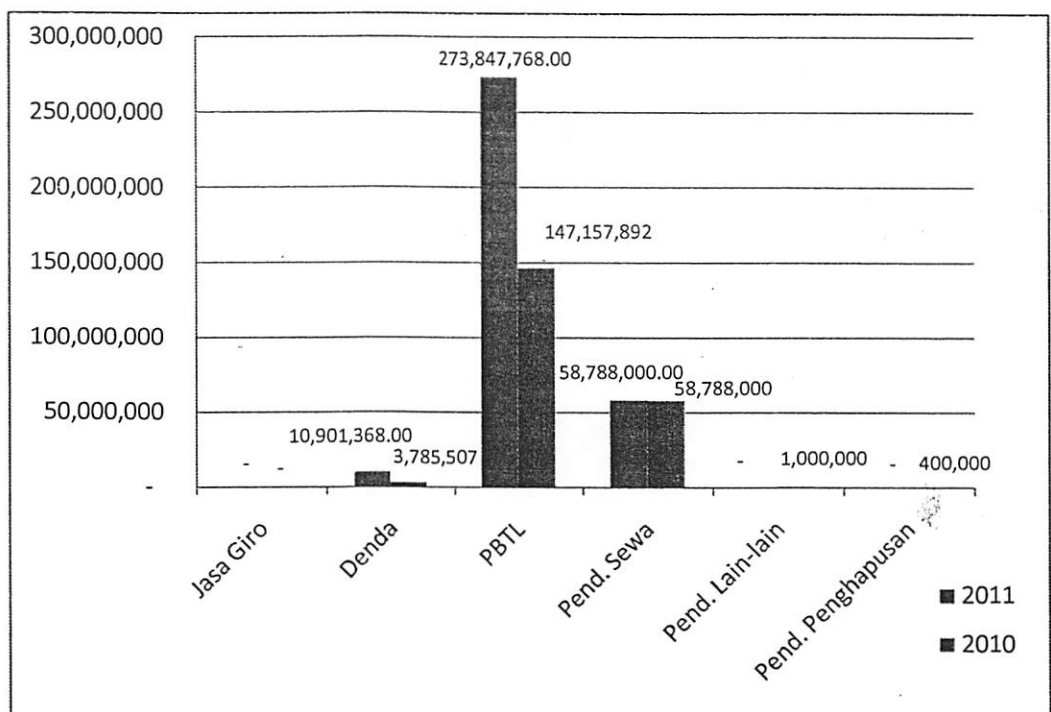
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp343.537.136,00

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Estimasi pendapatan Negara dan Hibah yang dialokasikan pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp0,00 (Nihil). Namun demikian, hingga per 31 Desember 2011 realisasi pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai sebesar Rp343.537.136,00 yaitu berupa pendapatan sewa gedung sebesar Rp58.788.000,00; pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu sebesar Rp273.847.768,00 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp10.901.368,00.

Grafik : Komposisi Realisasi PNBP



Realisasi PNBP
Rp343.537.136,00

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP tahun 2011 adalah sebesar Rp343.537.136,00 sedangkan realisasi PNBP tahun 2010 sebesar Rp211.131.399,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp132.405.737,00 atau 62,71%. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan pendapatan atas denda dan kenaikan pengembalian belanja tahun yang lalu, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**TABEL REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK(PNBP)
TAHUN 2011 DAN 2010**

dalam rupiah

NO.	URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2011	2010	
1	Jasa Giro	0	0	0
2	Denda	14.559.858	3.785.507	10.774.351
3	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	270.189.278	147.157.892	123.031.386
4	Pendapatan Sewa	58.788.000	58.788.000	0
5	Pendapatan Lain-lain	0	1.000.000	(1.000.000)
6	Pendapatan Penghapusan	0	400.000	(400.000)
	JUMLAH	343.537.136	211.131.399	132.405.737

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara
Rp68.611.548.245,00

Belanja negara pada tahun 2011 seluruhnya berasal dari rupiah murni, dengan realisasi belanja bruto sebesar Rp68.962.247.320,00 sedangkan pengembalian belanja sebesar Rp350.699.075,00 sehingga realisasi belanja bersih sebesar Rp68.611.548.245,00 atau mencapai 86,07% dari anggaran sebesar Rp79.719.292.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp54.173.126.242,00 terdapat kenaikan sebesar Rp14.438.422.003,00 yang terjadi terutama karena adanya kenaikan belanja barang non operasional Komisi Yudisial RI.

**TABEL REALISASI BELANJA NEGARA
TAHUN 2011 DAN 2010**

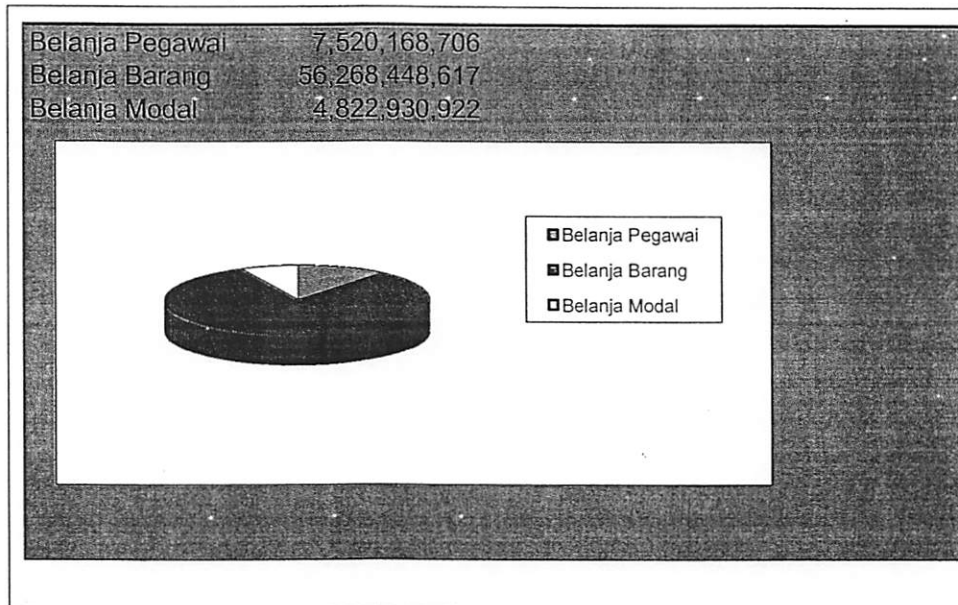
dalam rupiah

No.	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)
		2011	2010	
1.	Belanja Rupiah Murni	68.611.548.245	54.173.126.242	14.438.422.003
	1.1. Belanja Pegawai	7.520.168.706	6.202.123.278	1.318.045.428
	1.2. Belanja Barang	56.268.448.617	46.448.992.726	9.819.455.891
	1.3. Belanja Modal	4.822.930.922	1.522.010.238	3.300.920.684
2.	Belanja Pinjaman Luar Negeri	-	-	-
3.	Belanja Rupiah Pendamping	-	-	-
4.	Belanja Hibah	-	-	-

B.2.2.1. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Realisasi belanja tahun 2011 sebesar Rp68.611.548.245,00 atau 86.07% dari anggarannya. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:



Grafik : Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2011

Jika dibandingkan tahun 2010 realisasi anggaran tersebut terdapat kenaikan sebesar Rp14.438.422.003,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2011 dan 2010

dalam rupiah

KD	Uraian Belanja	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)
		2011	2010	
51	Belanja Pegawai	7.520.168.706	6.202.123.278	1.318.045.428
52	Belanja Barang	56.268.448.617	46.448.992.726	9.819.455.891
53	Belanja Modal	4.822.930.922	1.522.010.238	3.300.920.684
	Jumlah	68.611.548.245	54.173.126.242	14.438.422.003

Belanja Pegawai
Rp7.520.168.706,00

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Dari total anggaran belanja pegawai tahun 2011 sebesar Rp8.254.620.000,00 realisasi belanja pegawai bruto sebesar Rp7.541.290.190,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp21.121.484,00 sehingga realisasi belanja pegawai bersih sebesar Rp7.520.168.706,00 atau 91,36%. Dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2010 sebesar Rp6.202.123.278,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.318.045.428,00 atau 21,25%. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan adanya penambahan tunjangan beras PNS dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dengan realisasi sebesar Rp191.974.650,00 atau 195.32% dari yang dianggarkan sebesar Rp98.288.000,00, kenaikan Gaji Pokok PNS dengan realisasi sebesar Rp3.484.197.320,00 atau 143.03%, gaji pokok Pejabat Negara dengan realisasi sebesar Rp318.704.900,00 atau 75.20% serta tunjangan beras dengan realisasi sebesar Rp14.860.560 atau 98.06%.

Terkait penurunan terhadap belanja gaji dan tunjangan PNS disebabkan adanya masa pensiun pegawai dan penarikan pegawai PNS yang dipekerjakan di Komisi Yudisial sehingga mengakibatkan penurunan terhadap belanja gaji dan tunjangan. Sementara PNS baru pengganti PNS yang ditarik, haknya berupa tunjangan struktural belum dibayarkan dikarenakan belum lengkapnya persyaratan administratif. Penurunan juga dikarenakan adanya pengurangan Tenaga Ahli yang habis masa jabatan dan tidak diperpanjang kembali, dan selesainya masa kerja pegawai Tidak Tetap (PTT). Dengan demikian realisasi perbandingan realisasi belanja pegawai tahun 2011 dibanding tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 21.25%.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2011 dan 2010**

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2011	2010	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.645.572.226	4.176.461.200	35.18
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.348.376.480	1.579.321.578	(14.62)
5121	Belanja Honorarium	526.220.000	342.550.000	53.62
5122	Belanja Lembur	0	103.790.500	(100)
5132	Belanja Asuransi Kesehatan	0	0	0,00
	JUMLAH	7.520.168.706	6.202.123.278	21.25

Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun secara keseluruhan terjadi kenaikan, namun tidak seluruh jenis belanja mengalami kenaikan. Kenaikan hanya terjadi pada belanja gaji dan tunjangan PNS dan belanja honorarium, sedangkan belanja lainnya mengalami penurunan.

Belanja Barang
Rp56.268.448.617,00

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Dari total anggaran belanja barang tahun 2011 sebesar Rp66.641.256.000,00 realisasi belanja barang bruto sebesar Rp56.598.026.208,00 dan terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp329.577.591,00 sehingga belanja barang bersih sebesar Rp56.268.448.617,00 atau 84,43%. Dibandingkan dengan realisasi belanja barang tahun 2010 sebesar Rp46.448.992.726,00 terjadi kenaikan sebesar Rp9.819.455.891,00 atau 21,14% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2011 dan 2010**

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2011	2010	
5211	Belanja Barang Operasional	5.169.300.793	15.848.471.396	(67.38)
5212	Belanja Barang Non Operasional	23.834.528.233	7.864.061.569	203.08
5221	Belanja Jasa	5.511.476.219	4.572.598.058	20.53
5231	Belanja Pemeliharaan	6.743.003.769	5.590.078.347	20.62
5241	Belanja Perjalanan dalam Negeri	14.542.756.744	12.573.783.356	15.66
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	467.382.859	0	100
	Jumlah	56.268.448.617	46.448.992.726	21.14

Belanja barang operasional mengalami penurunan sebesar atau 67,38%. Hal ini disebabkan penurunan kegiatan terkait belanja barang operasional lainnya sebesar Rp12.171.588.652,00, honor terkait operasional satuan kerja sebesar Rp9.450.000,00, sedangkan belanja pengiriman surat dinas pos pusat mengalami kenaikan sebesar Rp131.166.195,00, dan belanja keperluan perkantoran juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.340.701.854,00. Sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional
Tahun 2011 dan 2010**

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2011	2010	
5211	Belanja Barang Operasional	5.169.300.793	15.848.471.396	(67.38)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.399.382.958	1.058.681.104	126.64

Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun secara keseluruhan terjadi kenaikan, namun tidak seluruh jenis belanja mengalami kenaikan. Kenaikan hanya terjadi pada belanja gaji dan tunjangan PNS dan belanja honorarium, sedangkan belanja lainnya mengalami penurunan.

Belanja Barang
Rp56.268.448.617,00

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Dari total anggaran belanja barang tahun 2011 sebesar Rp66.641.256.000,00 realisasi belanja barang bruto sebesar Rp56.598.026.208,00 dan terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp329.577.591,00 sehingga belanja barang bersih sebesar Rp56.268.448.617,00 atau 84,43%. Dibandingkan dengan realisasi belanja barang tahun 2010 sebesar Rp46.448.992.726,00 terjadi kenaikan sebesar Rp9.819.455.891,00 atau 21,14% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2011 dan 2010**

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2011	2010	
5211	Belanja Barang Operasional	5.169.300.793	15.848.471.396	(67.38)
5212	Belanja Barang Non Operasional	23.834.528.233	7.864.061.569	203.08
5221	Belanja Jasa	5.511.476.219	4.572.598.058	20.53
5231	Belanja Pemeliharaan	6.743.003.769	5.590.078.347	20.62
5241	Belanja Perjalanan dalam Negeri	14.542.756.744	12.573.783.356	15.66
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	467.382.859	0	100
	Jumlah	56.268.448.617	46.448.992.726	21.14

Belanja barang operasional mengalami penurunan sebesar atau 67,38%. Hal ini disebabkan penurunan kegiatan terkait belanja barang operasional lainnya sebesar Rp12.171.588.652,00, honor terkait operasional satuan kerja sebesar Rp9.450.000,00, sedangkan belanja pengiriman surat dinas pos pusat mengalami kenaikan sebesar Rp131.166.195,00, dan belanja keperluan perkantoran juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.340.701.854,00. Sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional
Tahun 2011 dan 2010**

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2011	2010	
5211	Belanja Barang Operasional	5.169.300.793	15.848.471.396	(67.38)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.399.382.958	1.058.681.104	126.64

521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	209.850.420	78.684.225	166.70
521115	Honor Terkait Operasional Satuan Kerja	193.115.000	202.565.000	(4.67)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2.366.952.415	14.508.541.067	(83.69)

Belanja barang non operasional mengalami kenaikan sebesar 203.08%. Hal ini disebabkan adanya penyerapan anggaran pada belanja barang non operasional. Adapun belanja barang non operasional yang dimaksud adalah belanja bahan sebesar Rp1.626.059.430,00, honor terkait output kegiatan sebesar Rp1.549.775.000,00 dan belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp20.658.693.803,00 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun 2011 dan 2010

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2011	2010	
5212	Belanja Barang Non Operasional	23.834.528.233	7.864.061.569	203.08
521211	Belanja Bahan	1.626.059.430	1.658.464.608	(1.95)
521213	Honor Terkait Output Kegiatan	1.549.775.000	1.114.165.000	39.10
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20.658.693.803	5.091.431.961	305.75

Belanja jasa mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20.53%. Hal ini antara lain disebabkan adanya kenaikan terkait belanja jasa profesi sebesar Rp1.399.855.000,00. Namun terdapat penurunan pada belanja sewa sebesar Rp383.480.667,00, belanja jasa konsultasi sebesar Rp37.284.555,00 dan belanja langganan daya dan jasa sebesar Rp197.211.617,00 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2011 dan 2010

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2011	2010	
5221	Belanja Jasa	5.511.476.219	4.572.598.058	20.53
522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	1.166.693.019	1.363.904.636	(14.46)
522113	Belanja Jasa Konsultan	97.300.000	134.584.555	(27.70)
522114	Belanja Sewa	368.758.200	752.238.867	(50.98)

522115	Belanja Jasa Profesi	3.721.725.000	2.321.870.000	60.29
522119	Belanja jasa Lainnya	157.000.000	0	100

Belanja pemeliharaan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20.62%. Hal ini antara lain disebabkan pada tahun anggaran 2011 terdapat peningkatan belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan yaitu sebesar Rp1.058.581.984,00 dan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp203.280.078,00. Total belanja pemeliharaan tahun anggaran 2011 sebesar Rp6.743.003.769,00 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2011 dan 2010

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2011	2010	
5231	Belanja Pemeliharaan	6.743.003.769	5.590.078.347	20.62
523111	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.924.875.699	4.866.293.715	21.75
523119	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	108.936.640	(100)
523121	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	818.128.070	614.847.992	33.06

Kenaikan belanja pada perjalanan luar negeri disebabkan pada tahun anggaran 2011 terjadi perjalanan dinas luar negeri Jakarta – Belanda dalam rangka studi banding dalam mengelola administrasi dan sumber daya pengadilan. Kenaikan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 15.66% yang disebabkan adanya peningkatan volume kegiatan baik dalam bentuk workshop, lokakarya, maupun konsolidasi jejaring sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Tahun 2011 dan 2010

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2011	2010	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	14.542.756.744	12.573.783.356	15.66
524111	Belanja Perjalanan Biasa	12.082.346.144	12.573.783.356	(3.90)
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	2.460.410.600	0	0

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri Tahun 2011 dan 2010

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2011	2010	
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	467.382.859	0	100
524211	Belanja Perjalanan Biasa – Luar Negeri	467.382.859	0	100
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	0	0	0

Belanja Modal
Rp4.822.930.922,00

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Dari total anggaran belanja modal tahun 2011 sebesar Rp4.823.416.000,00 terealisasi sebesar Rp4.822.930.922,00 atau 99.99% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2010 sebesar Rp1.522.010.238,00 terjadi kenaikan sebesar Rp3.300.920.684,00 atau 220.82% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2011 dan 2010

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2011	2010	
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.822.930.922	1.324.528.238	264.12
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	0	197.482.000	0
	JUMLAH	4.822.930.922	1.522.010.238	220.82

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kenaikan realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2011 sebesar 220.82% hanya terjadi pada belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan penurunan realisasi belanja terjadi pada belanja modal fisik lainnya, hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya penganggaran untuk belanja tersebut.

Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp3.498.402.684,00 atau 264.12% dikarenakan pengadaan peralatan dan mesin berupa server, komputer, printer dan interior gedung kantor.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Pada Tahun Anggaran 2011 Komisi Yudisial RI tidak menerima dan tidak mengelola hibah langsung dalam bentuk barang/jasa dari lembaga donor. Komisi Yudisial RI hanya mengarahkan apabila ada lembaga donor yang akan memberi bantuan hibah agar memberikan langsung kepada mitra kerja atau jejaring Komisi Yudisial RI.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2011.

Komposisi neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

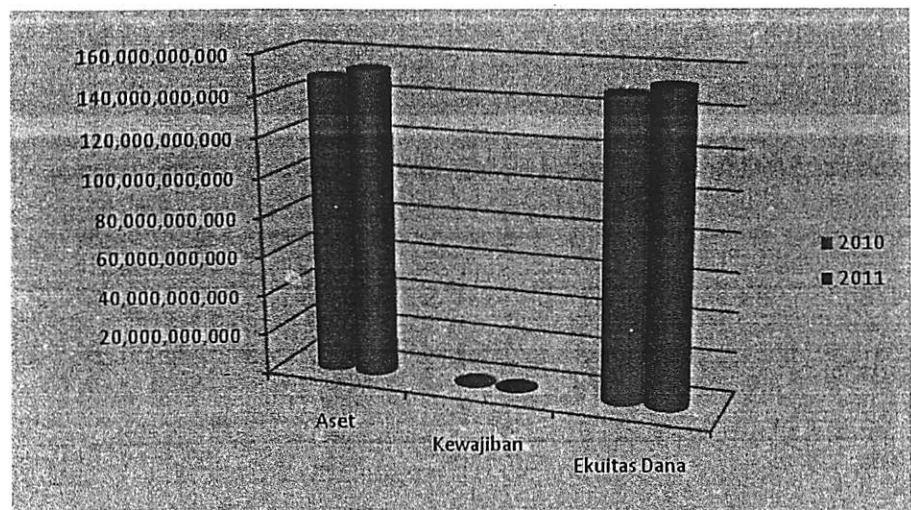
Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset	√ 153,265,262,354	148,594,978,005	4,670,284,349
Kewajiban	√ 29,704,155	73,787,464	(44,083,309)
Ekuitas Dana	√ 153,235,558,199	148,521,190,541	4,714,367,658

Jumlah Aset per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp153,265.262.354,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp946.285.216,00, Aset Tetap sebesar Rp151.012.775.538,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.306.201.600,00, X X

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp29.704.155,00 yaitu berupa kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga sebesar Rp19.500.000,00, utang kepada KUN sebesar Rp40.747,00, pendapatan diterima dimuka sebesar Rp9.798.000,00 dan pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp365.408,00.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp153.235.558.199,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp916.581.061,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp152.318.977.138,00.

Grafik komposisi neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 tersebut terlihat sebagai berikut:



C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

C.2.1. Aset Lancar

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp40.747,00*

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
40.747	0	40.747

Sampai dengan 31 Desember 2011 terdapat saldo sebesar Rp40.747,00. Jumlah tersebut merupakan saldo di rekening giro Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial RI yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Dana Uang Persediaan (UP) yang bersifat berdaur ulang sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi/penggantian selama tahun 2011 sebesar Rp6.722.362.661,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

No	Tanggal	Realisasi/Penggantian
1	Februari	999.199.451
2	April	999.321.200
3	April	998.298.163
4	Juli	996.760.019
5	September	967.233.747
6	Oktober	762.831.000
7	Desember	998.719.081
	Jumlah	6.722.362.661

Oleh karena bulan Desember 2011 realisasi penggunaan uang persediaan sebesar Rp998.719.081,00, maka pada akhir tahun 2011 terdapat sisa uang persediaan sebesar Rp1.280.919,00.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dikelola Bendahara Pengeluaran sebesar Rp30.419.566.000,00. Semua dana tersebut seluruhnya telah dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp30.293.720.759,00 sehingga terdapat sisa TUP sebesar Rp125.845.241,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SPM TUP	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Setor (Rp)	Tgl. Penyetoran
1	00007	1.412.229.000	1.411.887.307	341.693	10 Februari 2011

2	00051	2.180.694.000	2.180.662.682	31.318	17 Maret 2011
3	00154	3.007.119.000	3.006.980.737	138.263	12 Mei 2011
4	00299	2.835.370.000	2.835.226.332	143.668	09 Juni 2011
5	00388	4.141.700.000	4.141.535.942	164.058	29 Juli 2011
6	00513	1.284.820.000	1.284.775.766	44.234	12 Agustus 2011
7	00568	2.505.306.000	2.505.223.794	82.206	16 September 2011
8	00692	3.265.580.000	3.265.317.492	262.508	26 Oktober 2011
9	00790	3.097.088.000	3.096.894.572	193.428	18 November 2011
10	00859	6.689.660.000	6.565.216.135	124.443.865	31 Desember 2011
JUMLAH		30.419.566.000	30.293.720.759	125.845.241	

Kelebihan sisa TUP akhir Desember 2011 sebesar Rp124.443.865,00 telah disetor ke Kas Negara, sedangkan sisa dana UP sampai dengan akhir Desember 2011 sebesar Rp1.280.919,00. Oleh karena itu nilai total yang disetor ke kas negara pada tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp125.724.784,00.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp365.408,00

C.2.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo kas lainnya dan setara kas pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah		
31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
365.408	558.839	(193.431)

Sampai dengan 31 Desember 2011 terdapat saldo sebesar Rp365.408,00. Jumlah tersebut berasal dari sisa Dana Operasional Pimpinan (DOP) Tahun Anggaran 2011 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp193.431,00. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan DOP tahun 2011 lebih besar dibandingkan dengan penggunaan DOP tahun 2010, sehingga sisa DOP tahun 2011 menjadi lebih kecil dibandingkan dengan DOP tahun 2010.

Dana DOP tahun anggaran 2011 yaitu sebesar Rp1.200.000.000,00 dan digunakan dalam rangka memperlancar tugas pimpinan Komisi Yudisial RI sebesar Rp1.199.634.592,00 sehingga sisa Dana Operasional Pimpinan sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp365.408,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

No	Bulan	Rupiah
1	Januari	50,963,798
2	Februari	68,243,841
3	Maret	131,922,600
4	April	74,051,139
5	Mei	97,223,447
6	Juni	74,498,652
7	Juli	118,240,158
8	Agustus	59,810,818
9	September	54,487,071
10	Oktober	109,748,666
11	November	174,662,810
12	Desember	185,781,592
Total		1,199,634,592

Persediaan
Rp944.687.942,00

C.2.1.3 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang tersebut akan dimanfaatkan/digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah persediaan berdasarkan inventarisasi per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp945.879.061,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp143.086.619,00 jika dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.088.965.680,00, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
945.879.061,00	1.088.965.680,00	(143.086.619,00)

**Daftar Persediaan
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

Kode Akun	Uraian	Jumlah		Kenaikan/ Penurunan
		31 Desember 2011	31 Desember 2010	
115111	Barang konsumsi	430.255.473	195.627.982	234.627.491
115113	Bahan untuk pemeliharaan	9.347.900	28.096.240	(18.748.340)

115114	Suku cadang	36.578.425	68.607.317	(32.028.892)
115128	Barang Lainnya Untuk Dijual atau Diserahkan	370.498.510	726.896.150	(356.397.640)
115199	Persediaan lainnya	99.198.753	69.737.991	29.460.762
	Jumlah	945.879.061	1.088.965.680	(143.086.619)

Aset Tetap
Rp150.803.499.663,00

C.2.2.Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

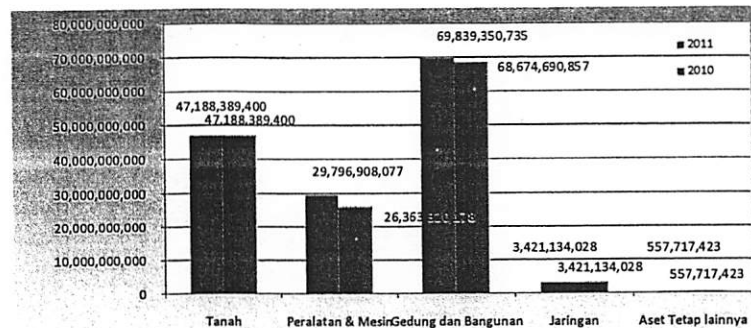
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp150.803.499.663,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.807.523.652,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember 2011 dan 2010

dalam rupiah

No.	Uraian	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tanah	47,188,389,400	47,188,389,400	0
2	Peralatan & Mesin	29,796,908,077	26,363,320,178	3,433,587,899
3	Gedung dan Bangunan	69,839,350,735	68,674,690,857	1,164,659,878
4	Jaringan	3,421,134,028	3,421,134,028	0
5	Aset Tetap lainnya	557,717,423	557,717,423	0
	Jumlah	150.803.499.663	146.205.251.886	4.598.247.777

Grafik komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 tersebut terlihat sebagai berikut:



Selama tahun anggaran 2011 terdapat penambahan nilai aset yang terdapat pada peralatan dan mesin sebesar Rp3.642.863.774,00 dan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.164.659.878,00 sehingga jumlah penambahan atau kapitalisasi aset tetap selama tahun 2011

sebesar Rp4.598.247.777,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Kapitalisasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2011**

dalam rupiah

No.	Uraian	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tanah	47,188,389,400	47,188,389,400	0
2	Peralatan & Mesin	29,796,908,077	26,363,320,178	3,433,587,899
3	Gedung dan Bangunan	69,839,350,735	68,674,690,857	1,164,659,878
4	Jaringan	3,421,134,028	3,421,134,028	0
5	Aset Tetap lainnya	557,717,423	557,717,423	0
Jumlah		150.803.499.663	146.205.251.886	4.598.247.777

Posisi Aset Tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada Simak BMN dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel Perbandingan Aset Tetap antar Neraca dan SIMAK BMN
Tahun 2011**

dalam rupiah

No.	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK BMN	Selisih
1	Tanah	47.188.389.400	47.188.389.400	0
2	Peralatan & Mesin	29,796,908,077	29.987.730.927	190.822.850
3	Gedung dan Bangunan	69.839.350.735	69.848.608.005	9.257.270
4	Jaringan	3.421.134.028	3.421.134.028	0
5	Aset Tetap lainnya	557.717.423	557.717.423	0
Jumlah		150.803.499.663	151.003.579.783	200.080.120

Selisih sebesar Rp200.080.120,00 adalah nilai Gedung dan Bangunan serta peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel per 31 Desember 2011, dengan rincian sebagaimana terlampir.

C.2.2.1 Tanah

Tanah
Rp47.188.389.400,00

Saldo Tanah pada Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2011 dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai No. 171 tanggal 4 April 2008 dengan nilai sebesar Rp47.188.389.400,00. Nilai tanah tersebut merupakan biaya perolehan pengadaan tanah yang terdiri dari harga tanah sebesar Rp46.991.400.000,00 dengan luas 5.780 m² dan biaya pengadaan sebesar Rp196.989.400,00 yang seluruhnya dilakukan dalam tahun 2007.

**Tabel Perbandingan Tanah
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
47.188.389.400	47.188.389.400	0

Peralatan dan Mesin
Rp29.796.908.077,00

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 sebesar Rp29.796.908.077,00. Jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2010 sebesar Rp26.363.320.178,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp3.433.587.899,00 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel Perbandingan Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
29.796.908.077	26.363.320.178	3.433.587.899

Kenaikan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp3.642.863.774,00 tersebut adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Penambahan :	
Saldo Awal	26.363.320.178
Pembelian	3.642.863.774
TransferMasuk	-
Pengembangan	-
Reklasifikasi Masuk	-
Jumlah Penambahan	30.006.183.952
Pengurangan:	

Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	209.275.875
Koreksi Nilai (Penghapusan)	-
Jumlah Pengurangan	-
Jumlah Netto	29.796.908.077

Penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp3.642.863.774,00 terdiri dari pembelian yang dilakukan pada tahun 2011. Pengurangan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp209.275.875,00 merupakan perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat sehingga tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintahan.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2011**

dalam rupiah

MA	Uraian	Jumlah
131311-3.04.01	Alat Pengolahan	2.633.180
131311-3.05.01	Alat Kantor	384.374.050
131311-3.05.02	Alat Rumah Tangga	999.809.600
131311-3.06.01	Alat Studio	245.656.750
131311-3.06.02	Alat Komunikasi	100.746.500
131311-3.08.01	Unit Alat Laboratorium	25.865.000
131311-3.12.01	Komputer Unit	941.263.744
131311-3.12.02	Peralatan Komputer	917.169.000
131311-3.18.01	Rambu-rambu lalu lintas darat	18.845.950
131311-3.19.01	Peralatan Olahraga	6.500.000
Jumlah		3.642.863.774

Gedung dan Bangunan
Rp89.839.350.735,00

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Pembangunan Gedung Kantor Komisi Yudisial RI dimulai tahun 2008 dan diselesaikan pada tahun 2009. Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp84.080.261.905,00 yang berasal dari tahun 2008 sebesar Rp44.774.672.353, dan tahun 2009 sebesar Rp39.305.589.552,00.

Dari jumlah nilai pembangunan gedung tersebut sebagian dilakukan reklasifikasi ke jenis aset lainnya, yaitu jaringan dan peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp15.744.346.343,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.985.877.202,00 dan
- b. Jaringan sebesar Rp3.421.134.028,00.

Pada tahun 2011 dilakukan penambahan yaitu berupa pemasangan karpet dan wall paper, partisi dan penataan ruang Tenaga Ahli, rollblind di area press room, partisi kaca, wall paper di lantai 5 dan partisi di lantai 5. Dengan demikian, maka nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp 69.839.350.735,00.

**Tabel Perbandingan Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
69.839.350.735	68.674.690.857	1.164.659.878

**Tabel Pengembangan Bangunan Gedung Kantor Permanen
Tahun Anggaran 2011**

dalam rupiah

Keterangan	Jumlah
Pemasangan Karpet Wallpaper dan Hurup Komisi Yudisial RI	15.283.750
Pemasangan Partisi dan Penataan Ruang Kerja Tenaga Ahli KY	91.839.000
Pemasangan Rollblind di area Press Room Lantai I dan Ruang Rapat Komisioner Lantai 5	40.120.955
Pemasangan Partisi Kaca, Pintu Kaca, Kusen Karpet, Vertikal Blind Wallpaper di Lantai 5 dan Pemasangan Sunblast di Lantai I	79.642.759
Pembuatan Partisi Ruangan Baru Lantai 5	45.302.000
Interior Gedung Komisi Yudisial RI	892.471.378
Jumlah	1.164.659.842

Jaringan
Rp. 3.421.134.028

C.2.2.4 Jaringan

Nilai Jaringan per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.421.134.028.00. Jumlah tersebut berasal dari reklasifikasi pembangunan gedung

yang telah diselesaikan pembangunannya pada tahun 2009.

**Tabel Perbandingan Jaringan
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
3.421.134.028	3.421.134.028	0

Aset Tetap Lainnya
Rp557.717.423,00

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp557.717.423,00. Tidak mengalami penambahan dikarenakan tidak adanya penambahan untuk Aset Tetap Lainnya pada tahun 2011.

**Tabel Perbandingan Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
557.717.423	557.717.423	0

**Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2011**

MA	Uraian	Jumlah
131921.6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	548.841.903
131921.6.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	5.460.000
131921.6.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	3.415.520
Jumlah		557.717.423

Aset Lainnya
Rp1.515.477.475,00

C.2.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap pada tanggal neraca.

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.515.477.475,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp215.275.875,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Perbandingan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

No.	Uraian	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Aset Tak Berwujud	1.306.201.600	1.300.201.600	6.000.000
2	Aset Lain-lain	209.275.875	0	209.275.875
	Jumlah	1.515.477.475	1.300.201.600	215.275.875

Aset Tak Berwujud
Rp1.306.201.600,00

C.2.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.306.201.600,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.000.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya pembelian software berupa Microsoft Office Professional FPP 2010.

**Tabel Perbandingan Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
1.306.201.600	1.300.201.600	6.000.000

Aset Lain-Lain
Rp209.275.875,00

C.2.3.2 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2011 sebesar Rp209.275.875,00. Merupakan barang yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintahan yang disebabkan oleh perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat.

**Tabel Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam
Operasional Pemerintahan
Per 31 Desember 2011**

MA	Uraian	Jumlah
131311.3.05.01	Alat Kantor	20.658.400
131311.3.05.02	Alat Rumah Tangga	23.888.500
131311.3.06.02	Alat Komunikasi	87.203.375
131311.3.10.01	Komputer Unit	75.550.000
131311.3.10.02	Peralatan Komputer	1.975.600
	Jumlah	209.275.875

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Hutang Kepada Pihak
Ketiga Rp19.500.000,00*

C.2.4.1 Hutang Kepada Pihak Ketiga

Hutang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2011 sebesar Rp19.500.000,00 yang merupakan kekurangan pembayaran atas tunjangan jabatan struktural untuk satu orang pejabat eselon II.

**Tabel Perbandingan Hutang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
19.500.000	63.430.625	(43.930.625)

*Pendapatan diterima
dimuka
Rp9.798.000,00*

C.2.4.2 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp9.798.000,00.

**Tabel Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
9.798.000	9.798.000	0

Pendapatan diterima dimuka tersebut tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sesuai dengan Surat Perjanjian antara Komisi Yudisial RI dengan BRI Nomor PERJ-05.SET.KY/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 dijelaskan bahwa sewa ruangan kantor Komisi Yudisial RI untuk Kantor Kas BRI dan ruangan untuk ATM BRI periode Desember 2011 sampai dengan Februari 2012 yaitu sebesar Rp14.697.000,00 yang telah diterima pada tanggal 29 November 2011.

Dari nilai tersebut, terdapat pendapatan sewa secara akrual sebesar Rp9.798.000,00 yang merupakan pembayaran sewa gedung dari Bank BRI untuk bulan Januari dan Februari 2012

*Uang Muka Kerja
Rp40.747,00*

C.2.4.3 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2011 pada Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial RI sebesar Rp40.747,00 berupa dana Uang Persediaan (UP) yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tahun berjalan.

**Tabel Perbandingan Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
40.747	0	40.747

*Pendapatan yang
Ditangguhkan
Rp365.408,00*

C.2.4.4 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2011 sebesar Rp365.408,00 jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp193.431,00. Dana ini merupakan sisa Dana Operasional Pimpinan yang sengaja disisakan untuk persiapan seandainya ada keperluan yang tidak terduga/mendadak. Sisa dana ini sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 18 November 2011.

**Tabel Perbandingan Pendapatan yang Ditangguhkan
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
365.408	558.834	(193.431)

*Ekuitas Dana Lancar
Rp916.581.061,00*

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/jangka pendek.

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp916.581.061,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp99.155.994,00 jika dibandingkan nilai per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.015.737.055,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

No.	Uraian	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Cadangan Persediaan	945,879,061	1,088,965,680	(143.086.619)
2	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(19,500,000)	(63,430,625)	43,930,625
3	Barang/Jasa yang harus diserahkan	(9,798,000)	(9,798,000)	-
Jumlah		916,581,061	1,015,737,055	(99.155.994)

Cadangan Persediaan
Rp945.879.061,00

C.2.5.1 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp945.879.061,00 mengalami penurunan sebesar Rp143.086.619,00 dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1.088.965.680,00 seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel Perbandingan Cadangan Persediaan
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

No.	Uraian	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Barang konsumsi	430.255.473	195.627.982	234.627.491
2	Bahan untuk pemeliharaan	9.347.900	28.096.240	(18.748.340)
3	Suku cadang	36.578.425	68.607.317	(32.028.892)
4	Persediaan Ke Masyarakat	370.498.510	726.896.150	(356.397.640)
5	Persediaan lainnya	99.198.753	69.737.991	29.460.762
	Jumlah	945.879.061	1.088.965.680	(143.086.619)

Dana Yang Harus
Disediakan Untuk
Permbayaran Hutang
Jangka Pendek
(Rp19.500.000,00)

C.2.5.2 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp19.500.000,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp43.930.625,00 dibandingkan periode sebelumnya.

**Tabel Perbandingan Dana Yang Harus Disediakan Untuk
Pembayaran Hutang Jangka Pendek
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
(19.500.000)	(63.430.625)	43.930.625

Barang/Jasa Yang Masih
Harus Diserahkan
Rp9.798.000,00

C.2.5.3 Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp9.798.000,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah pada periode sebelumnya yang merupakan jasa sewa gedung yang masih harus diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode bulan Januari sampai dengan

Februari 2012 sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa BRI KK Komisi Yudisial RI Nomor PERJ-05/SET/KY/XII/2011.

Ekuitas Dana Investasi
Rp152.318.977.138,00

C.2.6 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2011 sebesar Rp152.318.977.138,00 yang terdiri dari :

- 1) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp150.803.499.633,00
 - 2) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar Rp1.515.477.475,00
- Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.813.523.652,00 dibandingkan dengan jumlah periode sebelumnya.

**Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Investasi
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
152.318.977.138	147.505.453.486	4.813.523.652

Dana Diinvestasikan
Dalam Aset Tetap
Rp 150.803.499.663,00

C.2.6.1 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp150.803.499.663,00, terdiri dari:

- 1) Tanah sebesar Rp47.188.389.400,00;
- 2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.796.908.077,00;
- 3) Gedung dan Bangunan sebesar Rp69.839.350.735,00;
- 4) Jaringan sebesar Rp3.421.134.028,00 ; dan
- 5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp557.717.423,00.

**Tabel Perbandingan Ekuitas Dana
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
150.803.499.663	146.205.251.886	4.598.247.777

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp150.803.499.663,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.598.247.777,00 dibandingkan periode sebelumnya. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Aset Tetap.

Dana Diinvestasikan
Dalam Aset Lainnya
Rp1.515.477.475,00

C.2.6.2 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Dana yang diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar Rp1.515.477.475,00 berupa hak cipta, software dan sistem aplikasi

komputer dan Aset yang tidak dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

**Tabel Perbandingan Ekuitas Dana
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
Per 31 Desember 2011 dan 2010**

dalam rupiah

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
1.515.477.475	1.300.201.600	215.275.875

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.515.477.475,00 mengalami kenaikan sebesar Rp215.275.875,00 yaitu berupa pengadaan software computer dan terdapat perubahan kondisi barang dari baik menjadi rusak berat. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Aset Lainnya.

C.3 Catatan Penting Lainnya

Catatan Penting Lainnya

Pada tahun anggaran 2011 terdapat pengadaan sistem aplikasi yang menggunakan anggaran Belanja Barang dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pengembangan dan Pemutakhiran Aplikasi Track Record Hakim	126.240.000
Sistem Aplikasi Eksekutif (EIS)	102.230.000
Sistem Aplikasi Manajemen Investigasi Hakim	148.840.000
Pembuatan Sistem Aplikasi Pemantauan Persidangan	149.886.000
Pembangunan Sistem Aplikasi Riset dan Putusan Hakim	169.321.400
Pemutakhiran Website KY	59.005.000
Pembangunan Sistem Aplikasi Manajemen MoU	142.520.000
Pembangunan Sistem Informasi Aplikasi Proses Seleksi CHA	113.872.750
Software Pendukung Aplikasi	46.457.400
Aplikasi Job Tracking Sistem Penanganan Pengaduan	135.339.387
Jumlah	1.193.711.937

Berdasarkan hasil pertemuan trilateral antara Komisi Yudisial RI, BPK dan Departemen Keuangan pada tanggal 8 Maret 2012, diketahui bahwa sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 11 Bulan Desember Tahun 2011, daftar pengadaan sistem aplikasi sebesar Rp1.193.711.937,00 tidak dapat digolongkan sebagai aset tak berwujud. Adapun pengadaan sistem aplikasi tersebut diakui sebagai Realisasi Belanja Barang.

D. Pengungkapan Penting Lainnya

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terdapat empat temuan pemeriksaan. Atas temuan tersebut Komisi Yudisial RI telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI antara bulan April 2011 sampai dengan akhir Juni 2011 dengan rincian sebagai berikut:

D.1.1 Atas Sistem Pengendalian Intern Komisi Yudisial RI

Sesuai hasil laporan pemeriksaan Nomor : 90B/HP/XVI/05/2011 tanggal 20 Mei 2011 terdapat dua temuan yaitu:

1. Pembelian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dianggarkan pada Belanja Barang.
2. Pengendalian Intern atas Pengelolaan Persediaan kurang memadai.

Atas kedua temuan tersebut Komisi Yudisial RI telah menindaklanjuti keseluruhannya berupa:

1. Membuat Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Kepala Bagian Perencanaan Nomor 61/ND/SET.KY/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 agar dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan senantiasa berpedoman pada aturan yang berlaku (sesuai rekomendasi BPK).
2. Membuat Nota Dinas Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Nomor 59/ND/SET.KY/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 agar menerapkan sistem administrasi dalam pencatatan atau pengisian buku persediaan setiap ada mutasi barang persediaan baik karena pembelian, hibah atau karena penggunaan barang persediaan (sesuai rekomendasi BPK).

D.1.2 Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Sesuai hasil laporan pemeriksaan Nomor : 90C/HP/XVI/05/2011 tanggal 20 Mei 2011 terdapat dua temuan yaitu:

1. Pengalihan Anggaran antar Kegiatan untuk beberapa Realisasi Belanja Barang tidak sesuai Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
2. Denda Keterlambatan sebesar Rp3.658.490,00 belum dipungut dan terdapat Kemahalan Harga sebesar Rp15.622.600,00 dalam Pengadaan Pencetakan Buku Biografi dan Pemikiran Anggota Komisi Yudisial RI Periode 2005-2010.

Atas kedua temuan tersebut Komisi Yudisial RI telah menindaklanjuti keseluruhannya berupa:

1. Membuat Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Kepala Biro/Pusat dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 60/ND/SET.KY/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 agar dalam

melaksanakan program/kegiatan dan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN senantiasa berdasarkan DIPA dan POK yang telah ditetapkan. Serta Membuat surat peringatan Nomor 01/SP/SET.KY/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 kepada Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mematuhi ketentuan pengelolaan anggaran;

2. Denda keterlambatan telah disetor Kas Negara senilai Rp3.658.490,00 tanggal 26 April 2011. Serta memberikan peringatan Nomor 01/SP/SET.KY/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerimaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Pembuat Komitmen yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.

D.2 REKENING PEMERINTAH

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2010 tidak ada rekening Komisi Yudisial RI yang ditutup. Rekening yang dimiliki tetap dipertahankan. Daftar Monitoring Penutupan Rekening Komisi Yudisial RI selama semester II tahun 2010 sampai dengan semester I tahun 2011 dan Daftar Rekening Komisi Yudisial RI Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana terlampir.

Komisi Yudisial RI hanya mengelola satu rekening berdasarkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial RI oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I tanggal 31 Juli 2007 No.S-104/WPB.11/PK.01/2007 atas nama Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial RI RI di BRI Cabang Veteran Jakarta dengan No. Rekening 0329.01.001773.30.7.

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Transaksi pendapatan akrual berasal dari pendapatan sewa diterima dimuka sebesar Rp9.798.000,00. Jumlah tersebut berasal dari perjanjian sewa ruang kantor gedung milik Komisi Yudisial RI antara Komisi Yudisial RI dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : PERJ-05.SET.KY/12/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang menunjukkan bahwa BRI menyewa gedung Komisi Yudisial RI seluas 32m² untuk kantor BRI dan 6m² untuk ATM dengan periode 1 Desember 2011 sampai dengan 28 Februari 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp14.697.000,00 dan sudah dibayarkan seluruhnya oleh BRI pada tanggal 29 November 2011. Dengan demikian terdapat pembayaran sewa untuk semester I tahun 2012 selama dua bulan yang telah diterima oleh Komisi Yudisial RI pada bulan November 2011 sebesar Rp9.798.000,00.

Sedangkan transaksi belanja secara akrual yaitu Belanja Tunjangan Jabatan Struktural Tahun 2011 sebesar Rp19.500.000,00 yang dibebankan pada Tahun 2012.

Informasi Pendapatan dan belanja secara akrual sebagaimana terlampir.

D.4 Pengungkapan lain-lain

D.4.1 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Komisi Yudisial RI

Komisi Yudisial RI merupakan lembaga negara mandiri dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang dibentuk melalui perubahan ketiga

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara konstitutif Komisi Yudisial RI memiliki dua kewenangan, yaitu pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan kedua mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut tercantum secara tegas dalam Pasal 24B UUD 1945.

Komisi Yudisial RI memulai operasionalnya bulan Agustus 2005. Biaya operasional bulan Agustus sampai dengan Juni 2005 menggunakan anggaran Mahkamah Konstitusi RI. Anggaran Komisi Yudisial RI baru dialokasikan dalam DIPA tersendiri mulai tahun 2006 pada Bagian Anggaran 100.

D.4.2 Ketentuan Perundang-Undangan

Ketentuan yang menjadi landasan kegiatan operasional Komisi Yudisial RI selain pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah:

1. UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
2. UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
3. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
6. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan No.02/SKB.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
8. Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

D.4.3 Domisili

Alamat domisili kantor Komisi Yudisial RI adalah di Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat dengan nomor telepon 021-3905876, 3905877, dan nomor fax 021-31903755.